

---

## STRATEGI PNI DALAM MEMENANGKAN PEMILIHAN UMUM 1955 DI JAWA TENGAH

**Santoso Minarno**

Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang  
historiaunnes@gmail.com

### ABSTRACT

The purpose of this study is to describe how the implementation, development of PN , PNI rivalry with another party, and the strategy undertaken by the PNI in winning the 1955 election in Central Java . Using methods of historical research . In analyzing the data result , use the approach of political marketing theory. The results showed that the implementation of the 1955 elections conducted simultaneously in Central Java. PNI lot of sympathizers of the officials or gentry class and rural communities who are loyal to Sukarno. The main discourse raised PNI is basically dealing with people's independence Marhaenism and minor problems. Later , as a figure of discourse Bung Karno PNI is an important message that is effectively able to capture the sound of sympathy and lower class communities. PNI victory in the 1955 elections due to the implementation of the strategy in winning the election. The strategy is to strengthen the organizational structure and wing motion of a party to the center of the area. PNI victory in Central Java caused PNI right strategy in approaching local leaders.

Keywords: PNI, campaigns, political parties, elections 1955.

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan, perkembangan PNI, rivalitas PNI dengan partai lain, dan strategi yang dilakukan oleh PNI dalam memenangkan pemilu tahun 1955 di Jawa Tengah. Penelitian menggunakan metode sejarah. Dalam menganalisis data hasil temuan, digunakan pendekatan dari teori marketing politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilu 1955 dilakukan secara serempak di wilayah Jawa Tengah. PNI banyak mendapat simpatisan dari kalangan pejabat atau golongan priyayi dan masyarakat pedalaman yang loyal terhadap Sukarno. Wacana utama yang dimunculkan PNI pada dasarnya adalah berhubungan dengan marhaenisme dan masalah kemandirian rakyat kecil. Kemudian, wacana Bung Karno sebagai tokoh PNI merupakan pesan penting yang secara efektif mampu menjaring simpati dan suara dari masyarakat golongan bawah. Kemenangan PNI dalam pemilu 1955 disebabkan penerapan strategi dalam pemenangan pemilu. Strategi tersebut adalah penguatan terhadap struktur organisasi dan sayap gerak partai dari pusat sampai daerah. Kemenangan PNI di Jawa Tengah disebabkan strategi PNI yang tepat dalam melakukan pendekatan terhadap para pemimpin lokal.

Kata kunci: PNI, kampanye, partai politik, pemilihan umum 1955

---

#### Alamat korespondensi

Gedung C2 Lantai 1, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang  
Kampus Sekaran, Gunungpati, Kota Semarang 50229

## PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (pemilu) yang diselenggarakan pada tahun 1955 merupakan Pemilu pertama yang dilakukan di Indonesia. Rakyat menggunakan haknya untuk menentukan pilihan tentang siapa yang menjadi perwakilannya pada parlemen dan konstituante. Pemilu dilaksanakan dua tahap, yakni pada tanggal 29 September 1955 untuk pemilihan anggota parlemen dan pada 15 Desember 1955 untuk Konstituante (Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 1984: 222).

Pemilu yang dilakukan pada tahun 1955 terjadi pada kurun waktu ketika berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia tengah berada pada masa perkembangan tetapi masih fluktuatif. Dari tahun 1950 sampai 1961 jumlah penduduk meningkat sebesar 25,6 %. Diperkirakan jumlah penduduk pada tahun 1950 adalah 77,2 juta jiwa, pada tahun 1955 menjadi 85,4 juta jiwa dan pada sensus 1961 menjadi 97 juta jiwa (Ricklefs, 2005: 472). Jumlah angka melek aksara meningkat menjadi 46,7% dari jumlah anak-anak di atas usia 10 tahun pada tahun 1961 yang berimplikasi terhadap kenaikan oplah surat kabar antara tahun 1950-1956 adalah 86,6% dan majalah meningkat tiga kali lipat di atas 3,3 juta. Sampai tahun 1961, jumlah melek aksara di Jawa 45,5% dan 56,6% di Sumatera. Untuk penduduk laki-laki berusia 10-19 tahun jumlahnya di atas 76%. Sementara itu, oplah surat kabar pada tahun 1950 hanya di bawah 500.000 eksemplar dan pada tahun 1956 meningkat menjadi 933.000 eksemplar (Ricklefs, 2005: 474).

Ditinjau dari aspek politik, pelaksanaan Pemilu tahun 1955 berlangsung ketika Indonesia berada pada masa yang disebut sebagai masa "percobaan demokrasi" (Ricklefs, 2005: 289-311). Masa percobaan demokrasi (*the democratic experiment*) merupakan satu tahapan ketika Indonesia masih mencari format pemerintahan dan sistem politik yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Pada masa itu sistem pemerintahan bersifat liberal ketika menggunakan sistem parlementer. Periode

demokrasi parlementer merupakan masa paling dinamis saat bangsa Indonesia mulai bereksperimen dengan demokrasi (Feith, 1962: xi), Sistem parlementer multi partai dengan kekuatan berimbang memicu persaingan antar berbagai kelompok politik untuk saling menjatuhkan. Menjelang Pemilu pertama di Indonesia pada 1955, terdapat 172 partai dan kelompok kuasipolitik yang mencerminkan pertentangan eksternal dan pemisahan internal yang terus berlangsung dalam tradisi-tradisi politik Indonesia (Latif, 2005: 380-381).

Situasi transisi yang melatarbelakangi pelaksanaan Pemilu 1955 ditambah dengan adanya harapan yang besar dari berbagai kalangan terhadap Pemilu menjadikan partai-partai politik untuk melakukan strategi dalam rangka mendulang suara dari rakyat. Kampanyekampanye mulai dilakukan dan frekuensinya meningkat setelah Panitia Pemilihan Indonesia pada tanggal 16 April 1955 mengumumkan bahwa Pemilu untuk parlemen diadakan pada tanggal 29 September 1955 (Poesponegoro dan Notosusanto [ed], 1984: 219). Dinamika yang terjadi dalam kampanye Pemilu 1955 menyebabkan tarik ulur kepentingan masing-masing kekuatan politik menjelang Pemilu 1955.

Lingkup spatial penelitian ini adalah di Jawa Tengah. Jawa Tengah menjadi kajian dalam penelitian ini. Jawa Tengah yang dimaksud di sini adalah Jawa Tengah sebagai daerah Pemilu bukan sebagai wilayah administratif berdasarkan UU No 7 tahun 1953. Daerah Jawa Tengah sendiri meliputi Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditinjau dari skala nasional, hasil Pemilu di Jawa Tengah menyumbang sekitar 23,5% perolehan suara nasional pada pemilihan anggota parlemen dan menyumbang 23,9% dalam pemilihan anggota konstituante. Jumlah suara yang sah pada Pemilu di daerah Jawa Tengah mencapai 8.901.414 suara untuk pemilihan anggota parlemen dan 9.051.547 suara saat pemilihan anggota konstituante (Feith, 1971: 66).

Dikaitkan dengan empat partai pemenang Pemilu, Jawa Tengah pada pemilihan parlemen menyumbang keme-

nangan secara nasional sekitar 35,8% untuk PNI, 11,5 % untuk Masyumi, 25,5% untuk NU, dan sebagai penyumbang suara terbesar untuk PKI dengan perolehan suara 37,6% suara nasional. Pada pemilihan anggota konstituante, untuk tingkat nasional Jawa Tengah menyumbang suara 34,9% untuk PNI, 11,4% untuk Masyumi, 26% untuk NU, dan 36,9% untuk PKI. Jawa Tengah dengan demikian memiliki kontribusi terhadap kostelasi dan peta perpolitikan nasional pada tahun 1950-an (Feith, 1971: 66).

Secara spesifik penelitian ini mengangkat upaya yang dilakukan oleh PNI dalam memenangkan pemilu di Jawa Tengah. PNI dipilih sebagai objek kajian karena secara nasional PNI menduduki peringkat pertama hasil Pemilu dengan jumlah suara 8.434.653 Selain itu, PNI juga memperoleh suara terbanyak di Jawa Tengah, yakni 3.019.568 untuk pemilihan anggota parlemen (Ricklefs, 2004: 304; Feith, 1971: 78). Sebagai partai yang memenangkan Pemilu, PNI pasti memiliki strategi yang efektif untuk mempengaruhi pemilih, sehingga sanggup melampaui perolehan suara partai politik yang lain. Keunikan lain adalah PNI merupakan partai yang memiliki sejarah panjang, karena telah berdiri sejak zaman pergerakan nasional, sehingga telah banyak memiliki

pengalaman dalam perpolitikan nasional. Di satu sisi, selain sebagai partai pemenang dan partai yang telah berkembang cukup lama, hal menarik dalam PNI adalah bahwa pada saat itu, PNI bukan sebagai partai *incumbent*, di mana saat itu perdana menteri dipegang oleh Burhanudin Harahap, dari Masyumi. Hal ini menjadikan gerakan PNI semakin aktif untuk memenangkan Pemilu. Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana strategi yang dilakukan oleh PNI dalam memenangkan Pemilu 1955 di Jawa Tengah.

## METODE PENELITIAN

Sebagai penelitian sejarah, pemilihan sumber menjadi faktor utama dalam penelitian ini. Sumber-sumber yang digunakan sebagai sumber primer berupa sumber sezaman seperti Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 November 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. UUDS 1950, UU No 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 tentang Pemilu, serta UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. Kemudian untuk mencari data tentang

Tabel 1. Perbandingan Persentase Hasil Pemilu 1955 di Wilayah Jawa Tengah dengan Nasional

Nama Partai	% Suara Jateng	% Seluruh Indonesia
Masyumi	10,0	20,9
Nahdlatul Ulama	19,7	18,4
PSI dan Perti*	0,7	4,2
PNI	33,5	22,3
Partai-Partai Kristen**	0,8	4,7
PKI	25,8	16,3
Partai-partai lain***	9,5	13,1

Sumber: Profil Provinsi Jawa Tengah, 1992, hlm. 128.

### Keterangan

\*) Digabung karena persentase relatif kecil secara nasional

\*\*) Parkindo dan Partai Katolik

\*\*\*) PSI, Murba, PIR, PRI, IPKI, Parindra, Permai, Baperki, dll.

Tabel 2. Perolehan Suara Empat Besar Partai Pemenang Pemilu 1955 di Jawa Tengah

Nama Partai	Suara Pemilihan DPR	Suara Pemilihan Konsituante
PNI	3.019.568	3.171.588
Masyumi	902.387	892.556
NU	1.772.306	2.305.041
PKI	1.772.306	1.822.902

Sumber: Hebert Feith, 1971, *The Indonesia Elections of 1955* hlm. 66

wacana dan berbagai pertarungan wacana penulis mencari dari surat kabar yang terbit menjelang pelaksanaan Pemilu, baik Pemilu untuk anggota parlemen atau untuk konstituante. Surat kabar yang dijadikan kajian terdiri atas surat kabar yang dikeluarkan oleh partai seperti *Harian Abadi* milik Masyumi, *Suluh Indonesia* milik PNI, *Duta Masyarakat* milik NU, dan *Harian Rakyat* milik PKI. Selain itu untuk menjaga objektivitas peneliti menggunakan pula surat kabar yang terbit secara independen seperti *Suara Merdeka* dan *Kedaulatan Rakyat* serta beberapa terbitan lainnya yang mengulas tentang pelaksanaan kampanye dan Pemilu 1955. Dalam menganalisis data-data hasil temuan, peneliti menggunakan pendekatan dari teori marketing politik. Hal ini karena peneliti mencoba untuk mencari bagaimana bentuk-bentuk marketing politik yang dilakukan oleh partai-partai politik menjelang Pemilu. Dengan bantuan dari teori marketing politik peneliti kemudian dapat menemukan fakta-fakta sejarah berkaitan dengan pertarungan wacana yang dilakukan oleh partai politik dalam kampanye Pemilu 1955.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Pemilihan Umum 1955 di Jawa Tengah

Pemilu di Jawa Tengah menjadi salah satu tahapan penting untuk melihat bagaimana peta kekuatan parta-partai politik secara nyata pada saat itu. Hal ini karena Jawa Tengah menjadi penyumbang secara nasional suara partai-partai yang

beradu dalam pemilu, terutama *the big four*, yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Berikut adalah tabel sumbangan suara yang diberikan oleh Jawa Tengah terhadap suara di tingkat nasional.

Secara perolehan suara, berdasarkan data yang dihimpun oleh *Antara* tanggal 26 Desember 1955 untuk pemilu DPR, ternyata di sebagian besar wilayah Jawa Tengah dimenangkan oleh PNI, yakni di Kendal (selisih tipis dengan NU, yakni 72.541 suara), Pati (108.629 suara), Rembang (50.745 suara), Pekalongan (212.915 suara), Pemalang (158.156 suara), Tegal (132.159 suara), Brebes (150.593 suara), Banyumas (220.079 suara), Purbalingga (115.820 suara), Banjarnegara (101.121 suara), Wonosobo (90.106 suara), Purworejo (152.358 suara), Kebumen (125.306 suara), Sragen (131.072 suara), Karanganyar (66.648 suara), Wonogiri (167.467 suara), Bantul (40.820 suara), Sleman (47.570 suara), Kulonprogo (45.563 suara), Kota Pekalongan (17.842 suara), dan Kota Tegal (12.106 suara). Sementara itu, PKI menang di daerah Semarang (143.738 suara), Purwodadi (124.038 suara), Blora (80.380 suara), Cilacap (170.756 suara), Temanggung (65.764 suara), Klaten (204.296 suara), Boyolali (143.565 suara), Sukoharjo (86.689 suara), Gunungkidul (95.732 suara), Kota Semarang (97.053 suara), Kota Surakarta (75.345), Kota Yogyakarta (43.954 suara). Kemudian NU menang di daerah Demak (100.974 suara), Kudus (63.007 suara), Jepara (110.953 suara), Magelang (137.037 suara). Sedangkan Masyumi tidak menang di satu wilayahpun di Jawa Tengah. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Herbert Feith,

keempat partai pemenang Partai yang ada di Jawa Tengah hasilnya adalah seperti pada tabel 2.

### Strategi PNI dalam Pemenangan Pemilu

Penyusunan strategi dalam pemenangan pemilu dilakukan oleh PNI dalam situasi yang sangat menguntungkan. Hal ini terjadi karena sebelum pelaksanaan pemilu, yakni dari bulan Juli 1953 sampai Juli 1955, dapat dikatakan PNI adalah partai penguasa atau *incumbent*. Hal ini karena pada masa itu kabinet dipegang oleh Ali Sastroamidjojo sebagai seorang kader PNI. Beberapa pos yang strategis dalam kabinet dan pemerintahan dipegang oleh PNI, yakni Menteri Luar Negeri (Mr. Sunario), Menteri Keuangan (Dr. Ong Eng Die), Menteri Perekonomian (Mr. Iskaq Tjokrodisurjo) (Feith, 1962: 338-339). Selain itu, satu hal yang menguntungkan adalah bahwa pada tanggal 4 November 1953, kabinet membentuk Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) yang diketuai oleh S. Hadikusumo seorang kader PNI. Hal ini memberikan pengaruh terhadap kepercayaan dan *image* di kalangan masyarakat bahwa PNI adalah sesosok yang memimpin negara.

Strategi lain yang menjadi inti dari gerakan PNI adalah penekanannya pada pemikiran Sukarno yang sangat populis, yakni marhaenisme. Penyebab marhaenisme, partai ini memiliki daya tarik yang sangat besar bagi masyarakat muslim abangan, sebagian karena partai ini dianggap sebagai partai Sukarno (yang secara resmi tidak demikian karena presiden tidak menjadi anggota atau pimpinan partai manapun) dan sebagian karena partai ini dianggap merupakan imbangan utama terhadap keinginan-keinginan politik Islam. Demikian pula, PNI mendapat banyak dukungan di daerah-daerah Kristen di luar Jawa dan di Bali yang menganut agama Hindu, di mana juga terdapat perasaan-perasaan anti-Islam (Ricklefs, 2004: 477). Di lambang PNI tertulis tulisan “FRONT MARHAENIS”. Istilah ini merupakan konsep diadopsi oleh Sukarno untuk melihat bagaimana realitas sejumlah besar

dari Indonesia, terutama petani mandiri, yang walaupun sangat miskin dan ditekan oleh kapitalisme kolonial, adalah pemilik yang mandiri dan tidak termasuk orang yang proletar (Crib dan Kahin, 2004: 259). Marhaenisme pada esensinya sebuah faham perlawanan yang terbentuk dari socio-demokrasi dan sosio-ekonomi Bung Karno. Dari landasan inilah maka konsep kemandirian ini menjadi satu faktor penting yang dicoba kembangkan oleh Sukarno, bahkan setelah ia menjadi presiden dengan adanya konsep trisakti.

Gambar banteng juga menjadi salah satu alat yang digunakan untuk menjarung suara pemilih. Herbert Feith (1971) menjelaskan bahwa dalam kampanye PNI lambang banteng oleh para juru kampanyenya disebutkan sebagai lambang nasionalisme. Walaupun sabar dan pelan, tetapi memiliki potensi yang besar untuk digerakkan.

Melihat basis masyarakat Jawa Tengah yang sebagian besar hidup di pedesaan, program dari PNI merupakan campuran dari rekomendasi-rekomendasi untuk membantu buruh, menolong petani, mendorong pembangunan ekonomi, menasionalisasi industri-industri penting, mengorganisasi para pemuda dan berusaha menekankan pengaruhnya di segala lini (Khotimah, 2003: 44).

Untuk mendekati kalangan *abangan*, PNI menekankan aspek ekonomi sebagai salah satu strategi. Wacana yang disajikan PNI dalam mendekati kaum buruh adalah dengan melontarkan wacana pemerintah marhaenis. PNI mengusahakan terwujudnya pemerintah Marhaenis, yakni pemerintah yang ideologi dan usahanya selalu sesuai dengan kepentingan rakyat terbanyak yang miskin dan oleh karena itu dapat menjadi jaminan bahagia untuk rakyat seluruhnya. Aparatur masyarakat dan negara disusun untuk kepentingan Marhaen (Castle dan Feith, 1988: 167). Dan agar itu semua dapat tercapai haruslah jumlah anggota yang terbesar dari tiap-tiap badan perwakilan rakyat terdiri dari kaum Marhaenis, ialah pembela Marhaen dan prajurit yang berjuang untuk mewujudkan masyarakat Marhaenis. Dan untuk ini gerakan Marhaenis harus berjuang agar

selalu menang dalam pemilu. Disamping badan perwakilan rakyat yang bersifat politik itu harus ada pula majelis ekonomi yang terdiri dari wakil-wakil buruh pemimpin-pemimpin perusahaan dan wakil instansi pemerintah yang berkewajiban mengatur dan mengawasi jalan produksi serta distribusi barang keperluan hidup rakyat. Terutama yang perlu diatur dan diawasi ialah hubungan perburuhan serta produksi dan distribusi bahan-bahan hidup yang pokok untuk rakyat.

Terkait dengan masalah buruh, melalui konferensi di kota Magelang dari tanggal 16-19 April 1954. Diambilnya ketika itu keputusan-keputusan: (1) Menginsyafi betapa pentingnya sektor buruh dalam perjuangan mencapai cita-cita marhaenisme; (2) Dibentuknya Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia (KBKI) Jawa Tengah yang akan memberi pimpinan kepada cabang-cabang KBKI yang segera akan dibentuk; (3) Masalah Pemilu: memperhatikan dan mengikuti soal pendaftaran pemilih; Segenap anggota PNI di desa-desa supaya menyediakan diri secara aktif untuk menjadi anggota-anggota tambahan daripada PPP setempat; Tindakan-tindakan lain yang erat hubungannya dengan pendaftaran pemilih. (DPD PNI Jawa Tengah, 1969).

Strategi lain yang digunakan oleh PNI adalah dengan mengedepankan aspek "Sukarno" dalambagai kegiatan kampayennya. Hal ini menyebabkan masyarakat pedesaan begitu mengidolakan Sukarno tertarik untuk memilih PNI, karena menurut para propagandis PNI, Sukarno adalah bagian dari PNI. Dalam salah satu terbitannya bahkan mengangkat judul besar yang bertuliskan "Bung Kurni sudah Pasti Tusuk Tanda Gambar PNI". Hal ini dinyatakan oleh seseorang berinisial S bahwa dalam pemilu yang akan datang Bung Kurni sudah pasti memilih tanda gambar PNI (Suluh Indonesia, 15 September 1955). Wacana tentang Bung Kurni sebagai kader dari PNI merupakan sebuah wacana yang sangat penting dan efektif untuk menjaring suara dari kalangan masyarakat bawah, terutama di Jawa Tengah yang sebagian masyarakatnya adalah

masyarakat yang hidup di kawasan pedalaman dan cenderung lebih bersifat konformis dan agraris daripada masyarakat pesisir yang dinamis. Ini pulalah yang dimungkinkan menjadi faktor penentu kemenangan PNI yang sangat signifikan di Jawa Tengah. Sukarno menjadi daya tarik bagi pemilih dari kalangan masyarakat karena mereka percaya Sukarno sebagai sosok ratu adil.

Salah satu doktrin yang dimiliki oleh PNI adalah tentang doktrin OMDIS. OMDIS merupakan singkatan dari Organisasi, Militansi, Disiplin, Introspeksi, dan Setiakawan.

Pertama, organisasi. Dalam buku yang disusun oleh DPD PNI Jawa Tengah tahun 1969 dijelaskan bahwa PNI adalah organisasi dari rakyat Marhaen/ Marhaenis, organisasi perjuangan, oleh karenanya sesuai dengan tujuan yang akan kita capai itu adalah mulia dan luhur, maka kita harus menggunakan pula alat yang rapi dan teratur. Khususnya didalam mengelola organisasi digunakan prinsip-prinsip organisasi yang baik. Menindaklanjuti hal itu, pada tanggal 24-27 Desember 1953 di Purwokerto dibentuklah PAPU (Panitia Pemilu), yakni badan yang memiliki tugas merancang strategi pemenangan PNI, dalam rangka perjuangan Pemilu yang akan datang.

Kedua, doktrin dalam OMDIS yang kedua adalah militan. Dalam buku yang disusun oleh DPD PNI Jawa Tengah tahun 1969 dijelaskan bahwa militansi itu dalam hubungannya dengan organisasi adalah merupakan salah satu manifestasi daripada unsur organisasi yang berupa: adanya kesediaan/ kemampuan para anggotanya untuk menyumbang tenaganya. Militan itu dapat diartikan sebagai sifat dan sikap yang: "selalu siap dan sedia bertempur". Namun bagi kita pengertian "selalu siap dan sedia bertempur" itu bukan merupakan pengertian yang statis dan memang harus kita artikan secara dinamis. "Siap dan sedia bertempur" bisa dalam artian kita bertahan, tetapi juga bisa dalam artian menyerang.

Ketiga, faktor disiplin. Bagi PNI dan ormas-ormasnya disiplin terhadap prinsip

sudah cukup baik. Marhaenisme 1927 hingga kini tetap menjadi dasar perjuangan sebagian bangsa Indonesia, karena tujuan PNI adalah tujuan bangsa.

Suatu faktor yang besar pengaruhnya terhadap disiplin ialah faktor ideologi. Pimpinan atau anggota-anggota yang kurang memahami atau meresapi ideologi, dasar dan tujuan partainya mudah sekali goyah disiplinnya. Faktor lain yang banyak pengaruhnya terhadap kedisiplinan ialah faktor organisasi. Tujuan yang akan dicapai oleh organisasi harus meyakinkan, dan tidak meragukan. Keraguan akan melemahkan disiplin. Kecuali tujuan, penempatan orang-orang dalam organisasi itu pun tidak kalah pentingnya. Penempatan yang keliru, si pelaksana menjadi tidak tahu atau kurang senang apa yang menjadi tugasnya. Mengerti posisinya didalam organisasi pasti akan melakukan tugas dan kewajibannya yang sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan kesadarannya (DPD PNI Jawa Tengah, 1969).

Keempat, introspeksi. Introspeksi berarti mawas diri, atau dalam konteks bahasa Jawa “*mulat saliro*”. Tujuan mawas diri adalah untuk mengenal diri sendiri, untuk memberikan evaluasi pada diri sendiri. Orang yang mengenal akan dirinya sendiri, akan dapat melihat kekurangan-kekurangannya, dan akan bisa berusaha untuk memperbaikinya, sehingga pada akhirnya akan timbul kepercayaan pada diri sendiri dan tahu akan harga dirinya. Jadi pokoknya introspeksi adalah suatu usaha untuk meningkatkan taraf mental manusia. Dalam rangka perjuangan nasional introspeksi adalah salah satu segi dari *nation and character building*.

Kelima, setia kawan. Partai Nasional Indonesia adalah suatu partai besar, yang mempunyai anggota berjuta jumlahnya. Konon seorang pembesar pernah menyatakan, bahwa PNI Jawa Tengah saja mempunyai “daerah pengaruh” yang sedikitnya meliputi 50% dari seluruh wilayah Jawa Tengah. Di Jawa Tengah “diketemukan” pegangan yang dinamakan OMDIS itu, yang diharap akan menjadi senjata bagi para pengurus, para kader, dan

lain-lain untuk menunaikan tugasnya.

Solidaritas atau Setiakawan adalah suatu manifestasi dari kematangan jiwa seorang pejuang, yang sudah sanggup memilikikan kepentingan, ambisi dan aspirasi diri pribadi, atau barangkali lebih tepat dikatakan, yang sudah sanggup menjadikan kepentingan, ambisi dan aspirasi bersama menjadi kepentingan, ambisi dan aspirasi diri pribadi. Solidaritas adalah pengejawantahan sikap seorang pejuang yang berpegang teguh pada semboyan: *one in the many, and many in the one*. (Satu untuk semua dan semua untuk satu). Dalam organisasi yang begitu besar seperti PNI dengan segenap ormasnya, tidak cukup orang hanya akan berpegangan dan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Tetangga semata-mata. Di samping itu, terutama bagi para pemimpin dan para kader, harus ada tambahan pegangan, pedoman yaitu Solidaritas atau Setiakawan (DPD PNI Jawa Tengah, 1969).

Dari berbagai penjelasan di atas, kemenangan PNI dalam pemilu 1955 di Jawa Tengah sangat terkait dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Untuk menjawab hal tersebut ada dua hal yang harus dipahami. Pertama, aspek paternalisme yang bagi masyarakat Jawa Tengah sejak lama memang dikenal memainkan peranan penting. Kedua penampilan PNI ketika itu boleh dibilang memenuhi sebagian besar impian masyarakat, khususnya yang tinggal di pedesaan dengan janji dan pemihakannya terhadap masyarakat. Kekuatan PNI terutama pada keberhasilannya memegang tokoh masyarakat baik formal maupun nonformal, terutama yang berasal dari kalangan *priyayi*. Hal ini sangat memberikan pengaruh yang signifikan karena kecenderungan masyarakat pedesaan Jawa masing sangat memegang asas patron klien. Dengan sikap masyarakat pedesaan yang paternalistik, maka kemungkinan meraih suara lebih banyak jika tokoh-tokohnya telah berhasil dipegang, tentu akan lebih besar. Lebih lanjut lagi kemenangan PNI ditopang dengan adanya propaganda yang mengunggulkan partai dan mencoba untuk menjatuhkan partai lain. PNI mampu muncul sebagai pemenang

dalam pemilu tahun 1955 di Jawa Tengah.

## SIMPULAN

Wacana utama yang dimunculkan oleh PNI pada dasarnya adalah marhaenisme. Istilah ini merupakan konsep diadopsi oleh Sukarno untuk melihat bagaimana realitas sejumlah besar dari Indonesia, terutama petani mandiri, yang walaupun sangat miskin dan ditekan oleh kapitalisme kolonial, kaum marhaen adalah pemilik yang mandiri dan tidak termasuk orang yang proletar. Wacana tentang Bung Karno sebagai kader dari PNI merupakan sebuah wacana yang sangat penting dan efektif untuk menjaring suara dari kalangan masyarakat bawah, terutama di Jawa Tengah yang sebagian masyarakatnya adalah masyarakat yang hidup di kawasan pedalaman dan cenderung lebih bersifat konformis dan agraris daripada masyarakat pesisir yang dinamis.

PNI memenangkan pemilu secara mutlak di Jawa Tengah dengan mengantri sepertiga suara Jawa Tengah dan menangi di 21 Kabupaten/kota. Hal ini disebabkan oleh adanya strategi yang diterapkan, yakni upaya penguatan terhadap organisasi dan sayap gerak organisasi dari pusat sampai daerah dan organisasi massa yang dimiliki di segala lini. Kemudian, PNI mendekati pemimpin-pemimpin lokal sebagai sarana untuk mendapatkan suara dari masyarakat. Pelabelan Sukarno sebagai bagian dari partai juga menjadi salah langkah yang digunakan dalam mendapatkan simpati massa karena masih kentalnya paham paternalisme yang dimiliki masyarakat dan anggapan bahwa Sukarno adalah seorang ratu adil. Di Jawa Tengah DPD memiliki doktrin OMDIS (Organisasi, Militan, Disiplin, Instrospeksi, Setiakawan) sebagai panduan dalam melaksanakan strategi kemenangan partai.

## DAFTAR PUSTAKA

**Buku, Jurnal, dan Hasil Penelitian**  
Castles, Lance dan Feith, Herberth (ed). 1988.

*Permikiran Politik Indonesia 1945-1965.*  
Jakarta: LP3ES.

- Cribb, Robert & Audrey Kahin. 2004. *Historical Dictionary of Indonesia*. Maryland: The Scarecrow Press, Inc
- DPD PNI Jawa Tengah. 1969. *Dua Windu PNI Djawa Tengah*. Semarang: PNI Jawa Tengah.
- Feith, Herbert. 1954. "Toward Election in Indonesia". *Pacific Affairs*. Vol. 27, No. 3. (Sep., 1954). Hlm. 236-254.
- 1962. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Itacha: Cornell University Press.
- 1971. *The Indonesian Election of 1955*. New York: Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University.
- Friyanti, Fiska. 2005. "Pelaksanaan Pemilihan Umum dalam Sejarah Nasional Indonesia". *Skripsi*. Jurusan Sejarah FIS Universitas Negeri Semarang.
- Khotimah, Siti. 2003. "Peranan Pers dalam Perjuangan Partai Politik pada Masa Demokrasi Liberal 1950-1959 (Sebuah Tinjauan terhadap Suluh Indonesia dan Harian Rakjat)". *Skripsi*. Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Latif, Yudi. 2005. *Intelelegensi Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelelegensi Muslim di Indonesia Abad ke-20*. Jakarta: Penerbit Mizan.
- Oemar, Moh. dkk. 1994. *Sejarah Daerah Jawa Tengah*. Jakarta: Depdikbud.
- Poesponegoro, Marwati Djoned dan Notosusanto, Nugroho. (ed). 1984. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1954.
- Profil Provinsi Jawa Tengah tahun 1992.
- Ricklefs, M.C. 2005. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Terjemahan. jakarta: Serambi.
- Rocamora, J. Eliseo. 1970. "The Partai Nasional Indonesia". *Indonesia*. No 10 Oktober. hlm. 143-181
- Said, Tribuana. 1987. *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*. Jakarta: Haji Masagung
- Wicaksono, Gunawan. 2006. "Peran tentara teritorium IV diponegoro dalam pelaksanaan pemilihan umum 1955 di Jawa Tengah". *Skripsi*. Jurusan Sejarah FSSR Universitas Sebelas Maret.

**Surat Kabar dan Majalah**  
*Suluh Indonesia*, 15 September 1955  
-----, 28 September 1955